

PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MELALUI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA MIN CEMPALA KUNENG KABUPATEN PIDIE

Tarmizi¹, Jamaluddin Idris², Djailani AR³

¹) Magister Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

^{2,3}) Prodi Magister Administrasi Pendidikan Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh 23111, Indonesia

Email: jendelailmu500@yahoo.com, jamaluddinidris@hayoo.om, ar.djailani@yahoo.com

Abstract: *State Government Elementary School Cempala Kuneng is an educational institution that serves as a base level finance management education research and discussion of the results of this study, the management of the financing of education at the Min Cempala Kuneng have been implemented as programmed. This study used a descriptive approach and qualitative methods of data collection techniques documentation, observations and interviews, the research subject chief Madrasah, committee, treasurer, operator / administrative staff and teachers councils in Cempala Kuneng MIN. This study shows that: 1) planning on BOS MIN Cempala Kuneng already accordance with prevailing regulations. implementation is transparent and used in accordance with the existing guidelines, previously held a meeting with the school committee and the board of teachers. 2) Financing on BOS MIN Cempala Kuneng guided by the guide book for the procurement of BOS is the subject of books, teacher training, purchase of consumables, implement student activities, for transport costs, procurement of laboratory supplies, documentation, maintenance costs and the cost of making and lightweight procurement report. 3) Monitoring of the implementation of BOS MIN Cempala Kuneng made superintendent of schools and education authorities who are monitoring the implementation of government's efforts meskipun indirectly but very helpful in preventing the abuse of authority and misconduct. 4). BOS funds MIN Cempala Kuneng very supportive school students to free tuition, support schools in implementing the program activities, either to improve the infrastructure and improve the competence of teachers and educators.*

Keywords: *Management, Financing, and Supervision.*

Abstrak: Madrasah Ibtidaiyah Negeri Cempala Kuneng merupakan suatu lembaga pendidikan tingkat dasar yang berperan sebagai Pengelolaan pembiayaan pendidikan. Dari hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini, maka pengelolaan pembiayaan pendidikan pada Min Cempala Kuneng sudah dilaksanakan sesuai yang diprogramkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dokumentasi, observasi dan wawancara, Subjek penelitian kepala Madrasah, Komite, bendahara, operator/tenaga administrasi dan dewan guru di MIN Cempala Kuneng. Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) perencanaan dana BOS pada MIN Cempala Kuneng sudah sesuai ketentuan yang berlaku. pelaksanaannya sudah transparan dan dimanfaatkan sesuai dengan juknis yang ada, sebelumnya diadakan rapat dengan komite sekolah dan dewan guru. 2) Pembiayaan dana BOS pada MIN Cempala Kuneng berpedoman pada buku panduan BOS yaitu untuk pengadaan buku pokok pelajaran, pelatihan guru, membeli bahan habis pakai, melaksanakan kegiatan kesiswaan, untuk biaya transport, pengadaan bahan laboratorium, dokumentasi, biaya perawatan ringan dan biaya pembuatan dan pengadaan laporan. 3) Pengawasan terhadap pelaksanaan dana BOS MIN Cempala Kuneng dilakukan pengawas sekolah dan dinas pendidikan yang merupakan upaya pengawasan penyelenggaraan pemerintah meskipun secara tidak langsung namun sangat membantu dalam mencegah adanya penyalahgunaan wewenang dan tindakan pelanggaran hukum. 4). Dana BOS MIN Cempala Kuneng sangat mendukung sekolah untuk membebaskan iuran siswa, mendukung program sekolah dalam melaksanakan kegiatannya baik untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Kata kunci : Pengelolaan, Pembiayaan, dan Pengawasan

PENDAHULUAN

Salah satu program pemerintah pada tahun 2005 adalah Program Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak. Dalam program tersebut pemerintah mengalokasikan anggaran untuk membiayai empat program besar yaitu program pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah salah satu program pendidikan yang dialokasikan dana cukup besar. Penyaluran dana ini mulai dilaksanakan pada bulan Juli 2005 bersamaan dengan awal Tahun Ajaran 2005/2006. Program ini diberikan untuk sekolah-sekolah tingkat SD /MI dan SMP ini dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin dalam membiayai pendidikan setelah kenaikan harga BBM.

Faktor pengelolaan pembiayaan di dalam dunia pendidikan memegang peranan yang ikut menentukan keberhasilan pendidikan. Sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Pemerintah RI No.29 Pasal 27 tahun 1990 menyatakan "Pengelolaan pembiayaan suatu pendidikan dapat bekerjasama dengan masyarakat, terutama dunia usaha dan para dermawan dalam rangka perluasan dan peningkatan pendidikan".

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang menunjang tercapainya tujuan pendidikan, dimana tujuan pendidikan di Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional adalah mencerdaskan

kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab masyarakat dan kebangsaan. Departemen Pendidikan Nasional (2007:3) menyatakan; "Masalah pembiayaan pendidikan telah diatur dalam Undang Undang RI No.29 Tahun 2003 tentang sistem pembiayaan pendidikan, dimana dinyatakan bahwa; Pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dengan masyarakat." Manajemen Pembiayaan pendidikan dimulai dari sumber dana, perencanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Pengertian Pengelolaan Pendidikan

Pengelolaan berasal dari kata manajemen atau administrasi. Hal tersebut Seperti yang dikemukakan oleh Usman (2011:3): *Management* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Dalam beberapa konteks keduanya mempunyai persamaan arti, dengan kandungan makna terkontrol yang artinya mengatur dan mengurus.

Menurut Harun (2009:26) manajemen pendidikan adalah ilmu yang mempelajari penataan sumber daya, yaitu sumber daya manusia, kurikulum atau sumber belajar dan fasilitas untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal dan pencapaian suasana yang

baik bagi manusia. Terkait dengan proses pelaksanaan manajemen, Fattah (2009:1) mengemukakan bahwa:

“Dalam proses manajemen terlihat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer/pimpinan, yaitu: Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pemimpinan (*Leading*), dan Pengawasan (*Controlling*). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien”.

Dari beberapa pendapat tentang definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengelolaan atau manajemen adalah suatu proses kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, pengendalian, serta pengawasan terhadap penggunaan sumber daya organisasi baik sumber daya manusia, sarana prasarana, sumber dana maupun sumberdaya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Pengertian Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan Pendidikan adalah faktor penting dalam menjamin mutu dan kualitas proses pendidikan. Mulyono, (2010:77) Biaya secara sederhana adalah sejumlah nilai uang yang dibelanjakan atau jasa pelayanan yang diserahkan siswa.

Nanang Fattah (Mulyono, 2010:78)

menjelaskan bahwa pembiayaan pendidikan adalah jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan/mobile, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor(ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan dan supervisi pendidikan.

Menurut Riduwan. (2012:22), biaya pendidikan adalah total biaya yang dikeluarkan baik oleh individu peserta didik, keluarga yang menyekolahkan anak, warga masyarakat perorangan, kelompok masyarakat maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kelancaran pendidikan.

Pembiayaan Langsung Pendidikan

Biaya pendidikan langsung (*direct cost*) merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan yang dikeluarkan oleh sekolah, siswa dan atau keluarga siswa. Biaya langsung lebih mudah dihitung karena diketahui oleh parawajib pajak dan data sekolah pun tersedia, sementara biaya tidak langsung sulit untuk dihitung.

Menurut Fattah (2009:23), biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*) Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana

belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.

Biaya langsung berwujud dalam bentuk pengeluaran uang secara langsung digunakan untuk membiayai penyelenggaraan PBM pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, gaji guru dan pengawai lainnya, buku, bahan perlengkapan, dan biaya perawatan pendidikan.

Mulyono (2010:78), pembiayaan pendidikan sesungguhnya adalah sebuah analisis terhadap sumber-sumber pendapatan (*revenue*) dan penggunaan biaya (*expenditure*) yang diperuntukan sebagai pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Kebanyakan biaya langsung yang dikeluarkan berasal dari sistem persekolahan sendiri, dikeluarkan selain untuk menjaga kelancaran dan kualitas belajar juga untuk keperluan administrasi sekolah atau alat tulis kantor, keperluan lain yang dikeluarkan seperti untuk keperluan antara lain: (1) Biaya tambahan untuk ruangan, perlengkapan belajar, alat peraga, bahan laboratorium, pakaian praktik. (2) Biaya transportasi/angkutan sekolah (3) Biaya buku pegangan guru dan buku perpustakaan (4) Biaya UKS dan biaya penyelenggaraan counseling (5) Biaya kedatangan guru

tambahan/nara sumber.

Biaya Tidak Langsung Pendidikan

Biaya tidak langsung (*indirect cost*) berbentuk biaya hidup yang dikeluarkan oleh keluarga atau anak yang belajar untuk keperluan sekolah, biaya ini dikeluarkan tidak langsung digunakan oleh lembaga pendidikan, melainkan dikeluarkan oleh keluarga anak atau orang yang menanggung biaya peserta didik yang mengikuti pendidikan. Biaya tidak langsung merupakan biaya hidup yang menunjang kelancaran pendidikannya. Misalnya ongkos angkutan, pondokan, biaya makan sehari-hari, biaya kesehatan, biaya belajar tambahan adalah biaya seperti pendapatan yang hilang ketika siswa belajar. Biaya tidak langsung harus memperhitungkan juga biaya yang hilang ketika anak belajar. Pendapatan peserta didik hilang karena sedang mengikuti pendidikan, begitu juga dengan biaya-biaya pengorbanan lain yang dikeluarkan oleh peserta didik maupun keluarganya. Terbatasnya sumber-sumber yang dimiliki, khususnya sumber daya finansial, mendorong dilakukannya upaya perhitungan secara cermat program secara tepat, serta penentuan skala prioritas, hal tersebut dapat dilakukan melalui perencanaan biaya pendidikan. Perencanaan biaya pada dasarnya merupakan implementasi program dan kegiatan yang diterjemahkan ke dalam aspek-aspek yang diperlukan, seperti ketenangan, waktu, alat sarana prasarana lain yang mengandung konsekuensi perhitungan biaya.

Menurut Harun (200:104), bahwa “pembiayaan adalah sebagai alat bantu bagi manajemen untuk keperluan perencanaan dan pengendalian”. Hal ini mengalami pengembangan dari waktu ke waktu. Sisi penerimaan menggambarkan perolehan atau besarnya dana yang diterima oleh lembaga dari setiap sumber dana, misalnya dari pemerintah, masyarakat, orang tua peserta didik dan sumber-sumber lainnya. Sedangkan sisi pengeluaran menggambarkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk tiap komponen program.

Selanjutnya Engkoswara dan Komariah (2011:132) memberikan pengertian perencanaan pendidikan adalah “proses menetapkan keputusan yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai, sumber-sumber yang akan diperdayakan, dan teknik/metode yang dipilih secara tepat untuk melakukan tindakan selama kurun waktu tertentu agar penyelenggara sistem pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bermutu”.

Menurut Usman (2013:87), bahwa “Perencanaan pendidikan, yaitu (1) pendekatan kebutuhan sosial (*social demand approach*), (2) pendekatan ketenagakerjaan (*manpower approach*), (3) pendekatan untung rugi (*cost and benefit approach*), dan (4) pendekatan keefektifan biaya (*cost effectiveness approach*)”.

Berdasarkan pendapat di atas bahwa perencanaan merupakan suatu proses yang memungkinkan seseorang pimpinan melihat ke

masa depan sehingga dapat memilih dan menemukan arah kegiatan yang tepat, sehingga perencanaan merupakan nadi dari suatu manajemen. Jadi perencanaan suatu proses penetapan dan pemanfaatan sumber-sumber daya secara terpadu yang diharapkan dapat menunjang kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.

Biaya Personal Pendidikan

Suatu lembaga akan dapat berfungsi dengan memadai kalau memiliki sistem manajemen pembiayaan yang didukung dengan sumber daya manusia (SDM). Sekolah sebagai satuan pendidikan juga harus memiliki tenaga (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tenaga administratif, laboran, pustakawan, dan teknisi sumber belajar), sarana (bukupelajaran, buku sumber, buku pelengkap, buku perpustakaan, alat peraga, alat praktik, bahan dan ATK, perabot), dan prasarana (tanah, bangunan, laboratorium, perpustakaan, lapangan olah raga), serta biaya yang mencakup biaya investasi (biaya untuk keperluan pengadaan tanah, pengadaan bangunan, alat pendidikan, termasuk buku-buku dan biaya operasional baik untuk personil maupun nonpersonil).

Biaya untuk personil antara lain untuk kesejahteraan dan pengembangan profesi, sedangkan untuk biaya non personil berupa pengadaan bahan ATK, pemeliharaan, dan kegiatan pembelajaran. Suatu sekolah untuk memiliki tenaga kependidikan yang berkualitas

dengan jumlah yang mencukupi kebutuhan memerlukan biaya rekrutmen, penempatan, penggajian, pendidikan dan latihan.

Biaya merupakan kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, atau secara umum dapat disebut sebagai penyelenggaraan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan pokok dari sebuah organisasi, dimana di masa modern sekarang ini biaya merupakan kunci dalam pelaksanaan kegiatan atau alat yang paling penting dan perlu dilaksanakan.

Pembiayaan Sosial Pendidikan

Biaya sosial meliputi biaya pribadi dan biaya yang dibagi diantara anggota masyarakat yang lebih luas dalam melaksanakan suatu sistem pendidikan, dukungan masyarakat merupakan bagian dari total biaya yang berbentuk uang yang terkumpul melalui pajak, hibah, dan warisan. Pada setiap satuan pendidikan uang public mendekati total sumber pengeluaran yang dibiayai dan disubsidi dari masyarakat demi kelangsungan lembaga pendidikan.

Biaya sosial merupakan jumlah gabungan biaya pribadi dan biaya yang dibayar public. Total biaya langsung dan tidak langsung dapat dibandingkan dengan keuntungan sosial, guna memberikan dasar dalam pengambilan keputusan mengenai investasi sosial dibidang pendidikan.

Menurut Suhardan *et all* (2012: 24) biaya sosial pendidikan adalah “Biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat, baik perorangan

maupun terorganisasi untuk membiayai segala keperluan belajar”. Biaya yang dimaksudkan di sini adalah sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, karena pendidikan itu bukan mutlak sebagai kewajiban pemerintah dan orang tua saja, tetapi pendidikan itu adalah kewajiban pemerintah, orang tua dan juga seluruh masyarakat.

Biaya sosial pendidikan merupakan biaya pribadi ditambah biaya yang ditanggung oleh masyarakat, antara lain hasil pemungutan pajak yang dipergunakan untuk pendidikan, sumbangan, atau hibah dari masyarakat.

Selanjutnya Suhardan *et all* (2012: 84) menjelaskan bahwa:

Biaya sosial pendidikan merupakan gabungan biaya pribadi dan biaya yang dibayar publik. Total biaya langsung dan tak langsung dapat dibandingkan dengan keuntungan sosial, guna memberikan dasar dalam pengambilan keputusan mengenai investasi sosial dibidang pendidikan.

Biaya sosial merupakan jumlah gabungan biaya pribadi dan biaya yang dibayar publik. Total biaya langsung dan tidak langsung dapat dibandingkan dengan keuntungan sosial, guna memberikan dasar dalam pengambilan keputusan mengenai investasi sosial dibidang pendidikan.

Dana Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai bagian dari kebijakan realokasi

dari pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Program ini bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin, terhadap biaya pendidikan pasca lonjakan harga BBM yang signifikan.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan ke sekolah dan setiap sekolah menentukan sendiri pelaksanaannya. Sekolah umumnya menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) lebih untuk keperluan sekolahnya digunakan sebagai subsidi umum dari pada menyediakan subsidi bagi siswa dari keluarga miskin. Karena itu, pemerintah perlu memberikan klarifikasi peran program dana Bantuan Operasional Sekolah dalam pembiayaan pendidikan, dan memperbaiki sasaran program serta sistem distribusi pendanaan.

Menurut Supriadi. (2010:112). “Pemerintah masih menjadi andalan utama dalam pembiayaan pendidikan di SD/MI ,s SLTP, terbukti dari 80% dana dalam RAPBS bersumber dari pemerintah. Sebanyak 18% lainnya berasal dari para siswa yang dikelola langsung oleh sekolah atau komite, sedangkan 1% sisanya berasal dari sumber-sumber lain”. Dari pendapat di atas dapat di ambil pengertian bahwa besarnya dana pengeluaran dan tingkat Pelaksanaannya, dapat diketahui sampai sejauh mana tingkat efektivitas dan efisiensi kegiatan yang bersangkutan.

Berdasarkan skala prioritas tersebut maka menghasilkan sejumlah daftar urutan prioritas anggaran. Menyetujui dan memadai setiap

paket-paket keputusan, dalam kegiatan ini dikembangkan sejumlah regulasi atau aturan sebagai landasan ilegal bagi otoritas dalam mengendalikan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Darma (2007:339), bahwa “anggaran sekolah adalah prakiraan kejadian keuangan di masa depan yang menunjukkan perkiraan pendapatan, pengeluaran, dan posisi keuangan sekolah”. Jadi dari pendapat di atas menyatakan bahwa dana merupakan uang yang disediakan untuk suatu keperluan, sedangkan biaya merupakan uang yg dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu; ongkos; belanja; dan pengeluaran.

Dana yang dimaksud dalam tesis ini adalah dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang merupakan dana satuan pendidikan operasional mencakup biaya personil dan biaya non personil bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dan lain-lain.

Dana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan iuran siswa, tetapi sekolah tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan

pendidikan kepada masyarakat. Penerimaan dan Pengeluaran. 1) Pembiayaan BOS langsung dikirim ke nomor rekening rutin sekolah oleh lembaga penyalur kantor Pos/Bank. 2) Pengeluaran pembiayaan berdasarkan permintaan penanggung jawab kegiatan harus diketahui oleh kepala sekolah dan disetujui oleh komite sekolah. 3) Pengambilan pembiayaan berikutnya oleh penanggung jawab kegiatan dapat direalisasikan setelah memberikan pertanggungjawaban pembiayaan yang diberikan sebelumnya kepada bendahara/guru. 4) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat dalam pembukuan c) Pelaksanaan dana BOS disekolah dan madrasah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara kepala sekolah/dewan guru dengan komite sekolah, yang harus didaftarkan sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAPBS.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian diusahakan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan peristiwa atau kejadian yang ada dan proses pengelolaan pembiayaan pendidikan melalui bantuan operasional sekolah di MIN Cempala Kuneng Kabupaten Pidie.

HASIL PEMBAHASAN

Pada pembahasan hasil penelitian ini akan dipaparkan beberapa temuan tentang hasil penelitian di lapangan dan dibandingkan dengan teori-teori yang relevan sesuai yang

telah diuraikan pada bab sebelumnya. Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, berikut akan dibahas terhadap data tersebut yang meliputi: 1). Pengelolaan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari dana bantuan operasional sekolah, 2). Penggunaan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari dana bantuan operasional sekolah, 3). Pengawasan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari dana bantuan operasional sekolah, pada MIN Cempala Kuneng Kabupaten Pidie.

Penyusunan anggaran sekolah

Penyusunan anggaran di sekolah/madrasah, merupakan persiapan awal dari suatu kegiatan pengelolaan pembiayaan pendidikan. Berkaitan dengan pengelolaan, langkah pertama yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara adalah melakukan telaah terhadap DIPA yang diterima, untuk menyusun RAPBS. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesesuaian antara dana penerimaan dengan dana pengeluaran di sekolah.

Berdasarkan data hasil penelitian, dengan kepala sekolah data dokumenter diperoleh keterangan bahwa jumlah siswa keseluruhan pada MIN Cempala Kuneng tahun ajaran 2012/2013 sebanyak 421 orang siswa, alokasi dana yang disediakan Rp 580000.- setiap siswa yang diberikan pemerintah . Pembiayaan BOS tersebut digunakan untuk kegiatan: 1) kegiatan

remedial/pengayaan; 2) membiayai ulangan, 3) membeli bahan habis pakai, 4) perawatan sekolah; 5) membayar GTT, 6) membiayai kegiatan profesi, dan 7) memberikan bantuan siswa miskin.

Pelaksanaan Pembiayaan pendidikan.

Hasil wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara dan komite sekolah diperoleh keterangan bahwa pelaksanaan dana BOS pada MIN Cempala Kuneng sudah sesuai dengan perencanaan sebagaimana ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan dana BOS yaitu untuk pengadaan buku pokok pelajaran, pelatihan guru, membeli bahan habis pakai, melaksanakan kegiatan kesiswaan, untuk biaya transport, dokumentasi, biaya perawatan ringan dan biaya pembuatan dan pengandaan laporan.

Dari keterangan di atas ditambah dengan data dokumentasi menunjukkan bahwa pelaksanaan dana BOS di MIN Cempala Kuneng sudah sesuai petunjuk teknis BOS tahun 2012. Dalam buku petunjuk teknis tersebut terdapat berbagai pedoman dalam bentuk lampiran-lampiran berbentuk buku seperti buku kas tunai, kas pembantu, buku Bank, buku pajak, buku inventaris dan buku lampiran tentang siswa miskin. Oleh karena itu kepala sekolah dengan mudah menyusun rencana dan mengelola dana BOS yang diterima untuk kelancaran kegiatan sekolah yang dipimpinnya.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya

bahwa selain dana bantuan operasional sekolah (BOS) atau biaya yang bersumber dari pemerintah, ada juga dana yang bersumber dari komite sekolah atau dari orang tua murid. Dari data yang ada, dana atau biaya tersebut digunakan untuk tambahan honor guru tidak tetap, honor pegawai tidak tetap, snack/minum guru, kegiatan ekstra kurikuler siswa, UKS, upacara nasional, kegiatan keagamaan/PHBI, kegiatan ujian tengah semester, dan honor kolektor komite sekolah.

Pengawasan terhadap pembiayaan pendidikan

Pengawasan dan kontrol adalah bagian tidak dapat dipisahkan dari proses pengelolaan pembiayaan pendidikan yang baik. Dengan pengawasan dapat mengukur efektifitas dan efisiensi keberhasilan dalam pencapaian tujuan pengelolaan dana pendidikan.

Sesuai dengan tahapan-tahapan dalam manajemen bantuan operasional sekolah, bahwa seluruh dana bantuan operasional sekolah yang diterima oleh pengelola dana BOS tidak terlepas dari proses pengawasann dan pengendalian. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan dana bantuan operasional sekolah pada MIN Cempala Kuneng juga tidak luput dari pengawasan tersebut, baik pengawasan terhadap dana secara internal maupun pengawasan pelaksanaan dana secara eksternal.

Hasil wawancara dengan kepala sekolah, bendahara dan komite sekolah diperoleh keterangan bahwa pengawasan terhadap

pelaksanaan dana BOS di MIN Cempala Kuneng dilakukan oleh pengawas sekolah, dinas pendidikan dan BPKP atau pihak terkait yang ada di daerah untuk pengujian dan penilaian terhadap setiap laporan serta mengusut kebenaran informasi dan pengaduan tentang penyalahgunaan wewenang, penyimpangan dan penyelewengan.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan data yang penulis sajikan dalam beberapa bab di atas, maka pada bab penutup ini akan diuraikan kesimpulan, implikasi, dan saran. Berdasarkan data yang diperoleh mengenai pengelolaan dana pendidikan pada MIN Cempala Kuneng Kabupaten Pidie meliputi pengelolaan, pembiayaan, dan pengawasan. Kesemuanya itu dapat diurai sebagai berikut:

1. Penatausahaan keuangan sekolah/madrasah, khususnya dalam penerimaan dan pengeluaran serta pelaporannya keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan belum dilibatkan secara langsung, dan juga dalam penyusunan RAPBM.
2. Perencanaan biaya (penganggaran) dari sumber dana belum terarah pada peningkatan mutu pendidikan. Artinya, kebutuhan biaya yang secara langsung berhubungan dengan PBM (proses belajar mengajar) dan pembinaan guru dan siswa, belum mendapatkan skala prioritas.

Pengawasan terhadap penggunaan biaya pendidikan pada MIN Cempala Kuneng

masih rendah, sehingga sumber-sumber pendidikan yang terbatas belum memberikan dampak yang optimal. Hal ini disebabkan pemanfaatan biaya masih kurang tepat dengan tidak memberikan prioritas bagi faktor-faktor yang benar-benar dapat memacu peningkatan prestasi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Fatah, N., 2008. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Harun, C., Z., 2009. *Manajemen Sumber Daya Pendidikan*. Yogyakarta: Pena Persada.
- Kemendiknas, 2006. *Panduan Manajemen Sekolah*. Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Umum
- Mulyono, 2010. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Permen.R.I. Nomor 76, 2012. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Tahun Anggaran 2013*. Jakarta: Kemdikbud.
- Supriadi, D., 2010. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Undang-undang RI. No.20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Eko Jaya.
- Usman, H., 2013. *Manajemen Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, N., 2012. *Manajemen Peningkatan Mutu Kinerja Guru*. Bandung: Citapusaka Media Perintis.